

## Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Samarinda Sebagai Bahan Evaluasi Kinerja Pembangunan Hijau

Rustam<sup>1,2\*</sup>, Muhammad Jalaluddin<sup>2</sup>, Yohanes Budi Sulistioadi<sup>1,2</sup>, Nadya Tursina<sup>3</sup> dan Siti Nurhasanah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) - SDGs Center LP2M Universitas Mulawarman

<sup>2</sup> Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda

<sup>3</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda

\*Email: [rustam@fahatan.unmul.ac.id](mailto:rustam@fahatan.unmul.ac.id)

### ABSTRACT

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a new direction to achieve green development in social, economic, environmental, and governance development. This study is a collaboration activity of the Geospatial Information Infrastructure Development Center (PPIIG)-SDGs Center of the Institute for Research and Community Service (IRCS) of Mulawarman University and Regional Planning and Development Agency of Samarinda City. The purpose of this study is to identify and analyze the achievement of the Samarinda City SDGs is based on the national targets and indicators. The method used is a desk study and focus group discussion based on available data and then analyzed based on the matching and vulnerability of city level of SDGs indicators and targets. The results showed that there are 100 indicators and 15 targets that are under the authority of the City Government of Samarinda. The result of this study is the SDGs indicator have been implemented and achieved on the national target in 42%, 16 % have been implemented but it's not been achieved on the national target yet, 2 % of indicator is not been implemented, and 40% of indicator is no data. The government of Samarinda focus on poverty, health, cities and settlement, education, fresh water, infrastructure, and governance to achieve the targets as tools to evaluating and improving their performance. There are gaps and challenges to improving and implementation the indicators, especially on data availability and awareness of government apparatus. Stakeholders' collaboration is deeply needed to achieve SDGs national targets and integrated to the Samarinda development planning.

**Keywords:** Target indicator; stakeholders, government; authority

### ABSTRAK

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan arah baru pembangunan hijau yang menekankan keberlanjutan dalam pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola pemerintahan. Kajian ini merupakan kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Universitas Mulawarman khususnya Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial dan SDGs Center Universitas Mulawarman dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Samarinda berdasarkan sasaran dan indikator TPB kewenangan Pemerintah Kota. Metode yang digunakan adalah studi meja dan diskusi terfokus terhadap capaian Indikator TPB yang tersedia, kemudian dianalisis berdasarkan *matching* dan pemetaan indikator dan target TPB Kota. Kemudian dilakukan identifikasi sumber data dan pengelompokan status capaian TPB/SDGs. Hasil analisa menunjukkan terdapat 100 indikator dari 15 tujuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target mencapai 42 %, sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai 16 %, tidak dilaksanakan 2 % dan tidak ada data 40%. Indikator-indikator dengan konteks kemiskinan, kesehatan, kota dan permukiman, pendidikan, air bersih, infrastruktur dan tata kelola menjadi fokus utama dalam upaya evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya tercapaian target dari TPB/SDGs. Permasalahan lain dalam pencapaian target TPB/SDGs ialah manajemen pengelolaan dan ketersediaan data di tingkat perangkat daerah yang belum terkelola dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap hasil capaian TPB/SDGs. Hasil dari capaian TPB/SDGs di Kota Samarinda masih dapat diperbaharui dengan memenuhi kebutuhan data pada tiap indikator, sehingga diharapkan target di tahun 2030 dapat dipenuhi. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk pencapaian target TPB/SDGs.

**Kata kunci:** Target indikator; para pihak; pemerintah; kewenangan

## PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah komitmen Global dan Nasional yang bertujuan dalam upaya penyelesaian masalah-masalah perbaikan pembangunan yang inklusif melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif. Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (Ishartono dan Raharjo, 2016). Indonesia adalah salah satu negara dari 159 negara di dunia yang meratifikasi TPB/SDGs, bahkan program 94 dari 241 indikator TPB/SDGs menjadi target capaian di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Bappenas, 2019).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), tetapi memiliki perbedaan mendasar. MDGs dalam pelaksanaannya sangat birokratis dan eksklusif tanpa pelibatan unsur non-pemerintah, sementara SDGs memiliki tujuan yang luas dan komprehensif, mengandung unsur-unsur non-pemerintah dan bersifat universal. SDGs disusun melalui proses yang terintegrasi dan sangat inklusif dimana semua pihak meliputi pemerintah, masyarakat sipil, media, peneliti, sektor swasta, dan komunitas filantropis ikut berpartisipasi (SMERU, 2017; Bappenas, 2019).

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) penekanan utama adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 4 pilar pembangunan yaitu (1) Pilar Sosial; (2) Pilar Ekonomi; (3) Pilar Lingkungan; (4) Pilar Hukum dan tata Kelola; meliputi 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;

(12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Bappenas, 2020).

Pemerintah Indonesia cukup serius dalam upaya pelaksanaan TPB/SDGs dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang memuat sasaran TPB Tahun 2017-2019 dan dilanjutkan untuk sasaran tahun 2020-2024. Kemudian di tahun 2022 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat target capaian TPB tahun 2024 berdasarkan target capaian tahun 2030. Terdapat amanat yang menjadi fokus di Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yaitu dalam pasal 15 “Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas), Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya”. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi diwajibkan menyusun RAD TPB bersama-sama pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Secara nasional terdapat Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB), dan dijadikan dasar capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025. Seluruh fokus pembangunan dalam RPPJMN harus menjawab capaian indikator yang telah ditetapkan. Demikian pula seluruh rencana pembangunan di daerah mesti menjawab capaian indikator yang telah ditetapkan, sehingga dapat kebijakan ini berlaku dari tingkat nasional hingga daerah.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022, Pemerintah Kota Samarinda menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB), dengan melibatkan berbagai pihak seperti Ormas, Media, Pelaku Usaha, Akademisi, Pakar, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen melaksanakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2018 yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640-05/346/HK-KS/IX/2018 Tanggal 26 September 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Samarinda Tahun 2018-2019.

Surat Keputusan tersebut kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/179/HK-KS/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Samarinda Tahun 2022-2026, serta Perubahan Surat Keputusan Walikota tersebut dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 050-05/347/HK-KS/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Perubahan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kota Samarinda Tahun 2022-2026.

Untuk dapat mengukur pencapaian dari Target TPB/SDGs, diperlukan perangkat indikator dan ketersediaan data yang memungkinkan untuk mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Samarinda berdasarkan pada sasaran dan indikator TPB/SDGs. Pencapaian dari Target TPB/SDGs ditujukan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan hijau yang ada di Kota Samarinda.

Dalam prosesnya tidak mudah mengumpulkan data dan memberikan pemahaman yang detail kepada organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan tentang TPB/SDGs ini relatif masih baru dan mengintegrasikannya ke dalam program kegiatannya di daerah juga masih sulit. Hal ini tentu bukan hanya terjadi di Kota Samarinda, beberapa literatur menunjukkan beberapa kesulitan di berbagai negara terkait penyesuaian capaian, target dan indikator sesuai dengan konteks negara tertentu (Nilsson and Costanza 2015; Liu et al., 2015; Hjorth and Bagheri 2006). Oleh karenanya melalui kajian ini digambarkan capaian, tantangan dan peluang untuk memenuhi target capaian TPB/SDGs di Kota Samarinda, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pemenuhan data dan prioritas program pencapaian yang termuat dalam dokumen rencana pembangunan.

## METODE PENGAJIAN

Kajian pengabdian masyarakat ini merupakan kajian eksplorasi kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi meja (*desk study*) dan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion: FGD*), yaitu dalam pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data, serta informasi-informasi yang tersedia dengan menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen pembangunan di Kota Samarinda, Badan Pusat Statistik dan beberapa

instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kota Samarinda, yang kemudian diklarifikasi dengan diskusi terfokus terhadap OPD terkait. Kegiatan pengumpulan data hingga analisis dimulai pada bulan Juni hingga Desember 2022.

## **Matching dan Pemetaan Indikator dan Target SDGs Tingkat Kota**

Mekanisme *matching* dilakukan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator yang tersedia mengacu kepada Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi II yang disediakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Dimana sebelumnya telah terbit juga Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi I yang pada masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki jumlah indikator yang berbeda, yaitu 308 indikator pada tingkat pusat, 235 indikator pada tingkat Provinsi, 220 indikator pada tingkat Kabupaten, dan 222 indikator pada tingkat Kota. *Matching* dan pemetaan indikator disesuaikan dengan kondisi ketersediaan data, disagregasi dan kewenangan. Jika data tersedia maka indikator tersebut bisa digunakan, namun sebaliknya jika tidak tersedia diputuskan bahwa indikator tersebut tidak masuk kedalam bagian indikator yang menjadi target. *Matching* indikator TPB Metada Edisi II pada kajian ini dilakukan di awal dan disampaikan pada Perangkat Daerah saat Diskusi Terfokus.

## **Identifikasi Sumber Data dan Pengelompokan Status Pencapaian TPB/SDGs**

Teridentifikasinya jumlah target dan indikator dari proses *matching* dan pemetaan Indikator dan Target SDGs, maka selanjutnya dilakukan penentuan sumber data indikator-indikator TPB/SDGs tersebut melalui data yang tersedia di Kota Samarinda. Adapun sumber data dan informasi yang dapat dipergunakan ialah dokumen-dokumen pembangunan di Kota Samarinda, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan Kota Samarinda dan beberapa instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kota Samarinda.

Status pencapaian indikator TPB/SDGs disandarkan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memuat sasaran dan target Nasional. Pengelompokan status capaian terbagi ke dalam 4 (empat) status pencapaian yaitu sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS), sudah dilaksanakan tapi belum tercapai (SB), belum dilaksanakan (BB) dan tidak ada data (NA) yang sesuai dengan indikator pada

Buku Metadata Edisi II. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk mempermudah menyusun rekomendasi prioritas program pembangunan. Dalam menentukan prioritas program pada rencana pembangunan diarahkan pada indikator-indikator yang sudah dilaksanakan tetapi masih belum mencapai target.

**Diskusi Terfokus**

Status capaian indikator TPB/SDGs kemudian disampaikan pada proses diskusi terfokus yang berlangsung sebanyak 3 kali pertemuan. Diskusi juga dilakukan melalui media online *whatsapp* group untuk memastikan terkait tugas pokok dan fungsi OPD, kewenangan pemerintah Kota terkait nomenklatur program kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor P.90 Tahun 2019 serta dua kali perubahan Permendagri ini, serta memastikan ketersediaan data capaian indikator TPB/SDGs. Pada proses diskusi terfokus juga melibatkan para pihak, baik OPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), Perbankan, Akademisi dan Perwakilan Masyarakat (Kelurahan dan Tokoh Masyarakat).

**Analisis**

Klasifikasi capaian indikator TPB/SDGs kemudian dianalisis secara diskriptif dengan melihat berbagai peluang dan tantangan pencapaian termasuk berbagai faktor yang menghambat pencapaian indikator TPB/SDGs di Kota Samarinda bersumber dari hasil diskusi terfokus yang melibatkan para pihak terutama OPD di Kota Samarinda.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil *matching* dan pemetaan indikator TPB/SDGs di Kota Samarinda perlu penyesuaian terhadap jumlah target dan indikator kembali atas Rencana Aksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kota Samarinda sudah memiliki dokumen rencana Aksi TPB/SDGs. Hasil dari penyesuaian Indikator TPB/SDGs Edisi II untuk Kota Samarinda berjumlah 100 indikator meliputi 4 pilar pembangunan berkelanjutan. Tabel berikut merupakan indikator TPB/SDGs yang telah dilakukan pemilahan dan pemetaan indikator di Kota Samarinda tahun 2022 - 2026.

**Tabel 1.** TPB/SDGs 1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Di Manapun (Pilar Sosial) (Bappenas<sup>1</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim	BPS
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	BPS
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	BPS
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminana Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan. (Catatan: Kewenangan bukan lagi di Kota/Tupoksi Pengawasan Saja/Pindah Ke Provinsi)	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Disnaker
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	BPS / Dinas Kesehatan
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.	BPS / Dinas Kesehatan
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).	BPBD
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	BPBD

**Tabel 2.** TPB/SDGs 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Pilar Sosial) (Bappenas<sup>1</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Pertanian
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah	Dinas Pertanian dan BPS
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	Dinas Pertanian

**Tabel 3.** TPB/SDGs 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Pilar Sosial) (Bappenas<sup>1</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	BPS / Dinas Kesehatan
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	BPS / Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinas Kesehatan
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	BPS / Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq 18$ tahun.	Dinas Kesehatan
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi. (Bukan kewenangan)	Dinas Kesehatan; Badan Narkotika Nasional (BNN)
3.8.1*	Cakupan Pelayanan Kesehatan esensial	Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan

Pada ketiga tabel di atas merupakan bagian dari Pilar Sosial. Khusus untuk Tabel 3, dalam pengelompokan dan pemetaan indikator berdasarkan kewenangan tingkat kota terdapat indikator yang memiliki turunan atau sub-indikator, dimana pada pengisian data memiliki lebih dari 1 isian data. Adapun indikator tersebut ialah 3.1.2\* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan

terlatih; (b) di fasilitas Kesehatan, 3.2.1\* a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta. Dari ketiga indikator tersebut masing-masing akan memiliki 2 isian data, dimana isian tersebut akan berpengaruh terhadap capaian dari TPB/SDGs Kota Samarinda.

**Tabel 4.** TPB/SDGs Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Bappenas<sup>1</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat.	Dinas Pendidikan
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Dinas Pendidikan
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Dinas Pendidikan
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Dinas Pendidikan
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Dinas Pendidikan
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas	Dinas Pendidikan

Indikator TPB/SDGs Tujuan 4 yang merupakan bagian dari Pilar Sosial memiliki 6 indikator yang merupakan kewenangan kota. Namun terdapat indikator yang memiliki turunan atau sub-indikator di antaranya indikator 4.1.2\* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat, pada indikator 4.1.2\* (Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat) memiliki 3 sub-indikator berdasarkan tingkatan pendidikan. Selanjutnya pada indikator 4.5.1\* (Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat

SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/lakilaki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas) memiliki 7 sub-indikator berdasarkan pada tingkatan pendidikan, jenis kelamin dan penyandang disabilitas. Pengisian sub-indikator tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pengisian data capaian, mengingat masing-masing sub-indikator memiliki metode perhitungan dan ketersediaan sumberdata.

**Tabel 5.** TPB 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Pilar Sosial) (Bappenas<sup>1</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DPPKB
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DPPKB
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS

TPB/SDGs Tujuan 5 yang memiliki tujuan Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan merupakan bagian dari Pilar Sosial, secara umum merupakan tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pada Tujuan

5 terdapat indikator 5.5.1\* (Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah, indikator tersebut memiliki 2 isian yang berbeda untuk parlemen tingkat pusat dan pemerintah daerah.

**Tabel 6.** TPB/SDGs 6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak (Pilar Lingkungan) (Bappenas<sup>3</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	BPS dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)/ Dinas Kesehatan
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS dan Dinas PUPR/ Dinas Kesehatan
6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	BPS dan Dinas PUPR/ Dinas Kesehatan
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman.	Dinas PUPR

Tabel 6. terkait dengan TPB/SDGs Tujuan 6 yang berfokus terhadap pengelolaan air bersih dan sanitasi merupakan bagian dari Pilar Lingkungan. Dalam TPB/SDGS 6 terdapat 4 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kota, namun terdapat indikator yang memiliki lebih dari 1 turunan indikator atau sub-indikator yaitu pada indikator 6.2.1.(a) (Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.) dimana berdasarkan Edisi Metadata II masing-masing sub-indikator memiliki perhitungan tersendiri diantaranya yaitu

Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak; Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T); dan Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Dari ke 5 sub-indikator tersebut isian data akan menentukan status capaian dari indikator 6.2.1.(a).

**Tabel 7.** TPB 7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern (Pilar Ekonomi) (Bappenas<sup>2</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	OPD Pelaksana
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	Sekretariat Daerah
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga	Sekretariat Daerah
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Sekretariat Daerah

**Tabel 8.** TPB/SDGs 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan (Pilar Ekonomi) (Bappenas<sup>2</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	OPD Pelaksana
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS

**Tabel 9.** TPB/SDGs 9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi (Pilar Ekonomi) (Bappenas<sup>2</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan BPS

**Tabel 10.** TPB/SDGs 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara (Pilar Ekonomi) (Bappenas<sup>2</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (Tidak ada daerah tertinggal)	BPS
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas. (Akan dikoordinasi kan Dinas Sosial)	BPS
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. (Tidak ada)	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS dan BPJS

**Tabel 11.** TPB/SDGs 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Pilar Lingkungan) (Bappenas<sup>3</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Bappeda
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) / BPBD
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	BNPB / BPBD
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	DLH
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10	DLH
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	DLH
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BPBD
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal	DPUPR

**Tabel 12.** TPB 12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Pilar Lingkungan) (Bappenas<sup>3</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
12.3.1. (a)	Persentase Sisa Makanan	Dinas Pangan
12.4.1. (a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.	DLH
12.4.2*	(a) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya (m <sup>3</sup> )	DLH
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (Juta TON)	DLH
12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH

Indikator TPB/SDGs Tujuan 12 berkaitan dengan Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan yang merupakan bagian dari Pilar Lingkungan yang berfokus terhadap pengelolaan dan pengurangan limbah dan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Pada tujuan TPB/SDGs 12 terdapat indikator yang memiliki turunan atau sub-indikator yaitu indikator 12.4.2\*

a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengelolaannya (m<sup>3</sup>) dimana masing-masing sub-indikator memiliki metode perhitungan dan isian data yang berbeda, sesuai dengan ketersediaan data di tingkat kota.



**Tabel 13.** TPB/SDGs 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan (Pilar Lingkungan) (Bappenas<sup>3</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD
13.1.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana	BNPB / BPBD / Bappenas

**Tabel 14.** TPB/SDGs 16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh (Pilar Hukum dan Tata Kelola) (Bappenas<sup>4</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Bagian Ortal
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kota/Kota).	Inspektorat Daerah (ITDA)
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kota/Kota).	Bagian Organisasi
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq$ B	Bagian Organisasi
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik. (Bagian Organisasi)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA)/Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DP2PA/BKD, DPRD
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Disdukcapil & Dinas Sosial (Dinsos)
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	BPS dan Disdukcapil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	BPS dan Disdukcapil
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

**Tabel 15.** TPB/SDGs 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global (Pilar Ekonomi) (Bappenas<sup>1</sup>, 2020)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
17.8.1*	Persentase pengguna internet.	BPS
17.17.1. (a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diterbitkan setiap tahun.	Pemerintah Kota (Pemkot)

No Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data
17.17.1. (b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Pemkot
17.17.1. (c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Pemkot
17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Pemkot

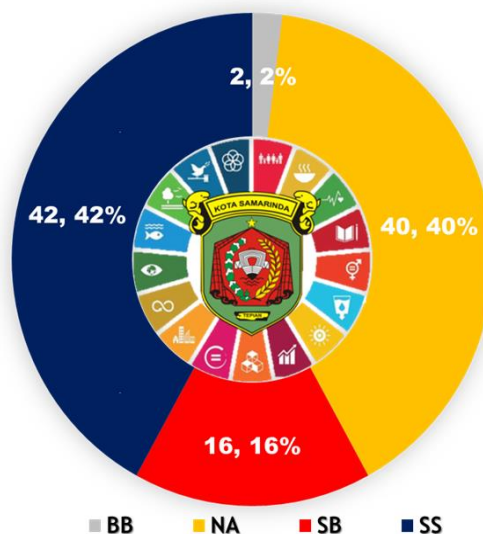
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) berdasarkan Edisi Metadata II setelah dilakukan pemetaan dan pemilahan dan pemetaan kesesuaian indikator berdasarkan kewenangan dan ketersediaan data di Kota Samarinda terdiri dari 15 Tujuan dan 56 Target meliputi 100 Indikator yang merupakan bagian dari 4 Pilar yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan. Sementara untuk TPB/SDGs Tujuan 14 yang berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera tidak dimasukkan ke dalam bagian dari kewenangan Kota Samarinda, mengingat di Kota Samarinda tidak memiliki daerah perairan laut dan secara umum untuk perikanan dan kelautan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

TPB/SDGs tujuan nomor 15 yang merupakan bagian dari Pilar Lingkungan berfokus terhadap pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering. Pada TPB nomor 15 tidak dimasukkan ke dalam bagian dari kewenangan Kota Samarinda, mengingat tidak ditemukan adanya indikator yang merupakan bagian dari

kewenangan Kota dan secara umum indikator-indikator pada TPB 15 merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Kota samarinda telah berkomitmen untuk menjadikan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah untuk bersama-sama mewujudkan usaha mengentaskan kemiskinan, menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan menciptakan keamanan, keadilan bagi seluruh masyarakat di Kota Samarinda. TPB/SDGs yang mana indikator-indikator didalamnya mampu memberikan gambaran kondisi terkini dari pembangunan yang ada di Kota Samarinda meliputi kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan kondisi keamanan meliputi hukum.

TPB/SDGs jika dianalisis akan menunjukkan bagaimana kinerja perangkat daerah melaksanakan tupoksinya, dengan indikator yang terarah dan terukur serta melihat masing-masing kewenangan. Status pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk mempermudah menyusun prioritas program pembangunan. Dalam menentukan prioritas program pada rencana pembangunan diarahkan pada indikator-indikator yang sudah dilaksanakan tetapi masih belum mencapai target.



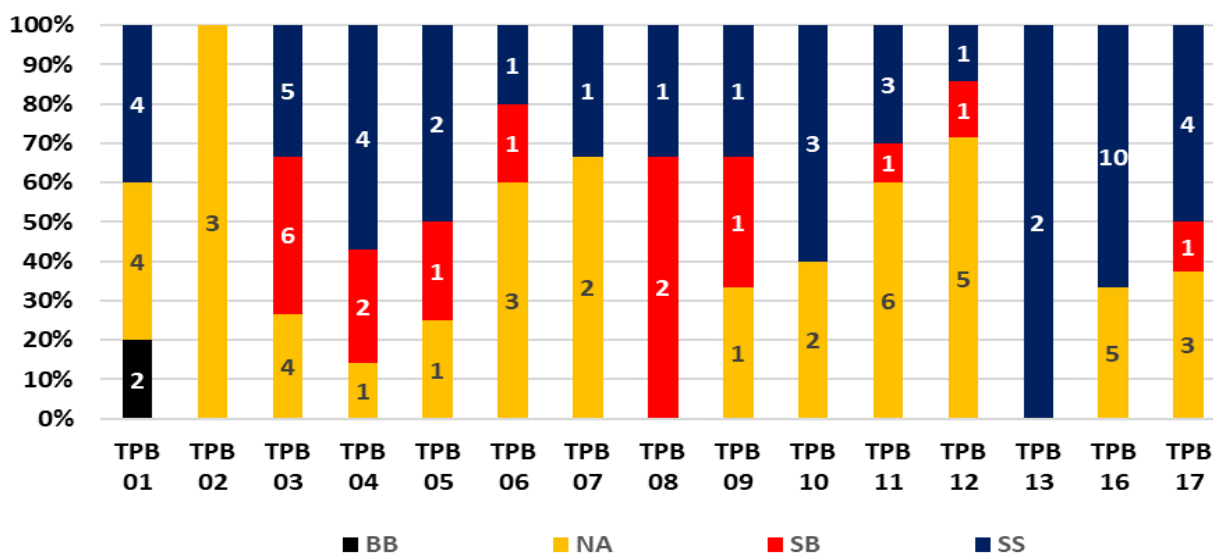
**Gambar 1.** Prosentase capaian TPB/SDGs di Kabupaten Samarinda (sudah tercapai (SS), sudah dilaksanakan tapi belum tercapai (SB), tidak dilaksanakan (BB) dan tidak ada data (NA))

Berdasarkan hasil analisis data status pencapaian TPB/SDGs di Kota Samarinda menunjukkan hasil yang cukup menarik, dimana cukup tingginya status capaian dengan tidak ada data (NA) yaitu 40 % dari keseluruhan indikator yang menjadi kewenangan kota. Persentasi tingkat capaian per kriteria seperti terlihat pada gambar Gambar 1.

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan (SS) mencapai 42 %, sudah dilaksanakan tapi belum tercapai (SB) 16 %, tidak dilaksanakan (BB) 2 % dan tidak ada data (NA) 40% dari 100 indikator TPB pada tingkat Kota. Salah satu penyebab cukup tingginya status capaian NA ialah terjadi ketimpangan pelaksanaan TPB di Kota Samarinda. Seperti halnya terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, dimana manajemen pengelolaan data pelaksanaan TPB, khususnya di Bappeda Kota, maupun di tingkat OPD-OPD tidak terkelola dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan data yang dibutuhkan dalam

upaya analisis pelaksanaan TPB/SDGs. Selain itu terdapat gap kesenjangan data antar OPD yang timpang maupun dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

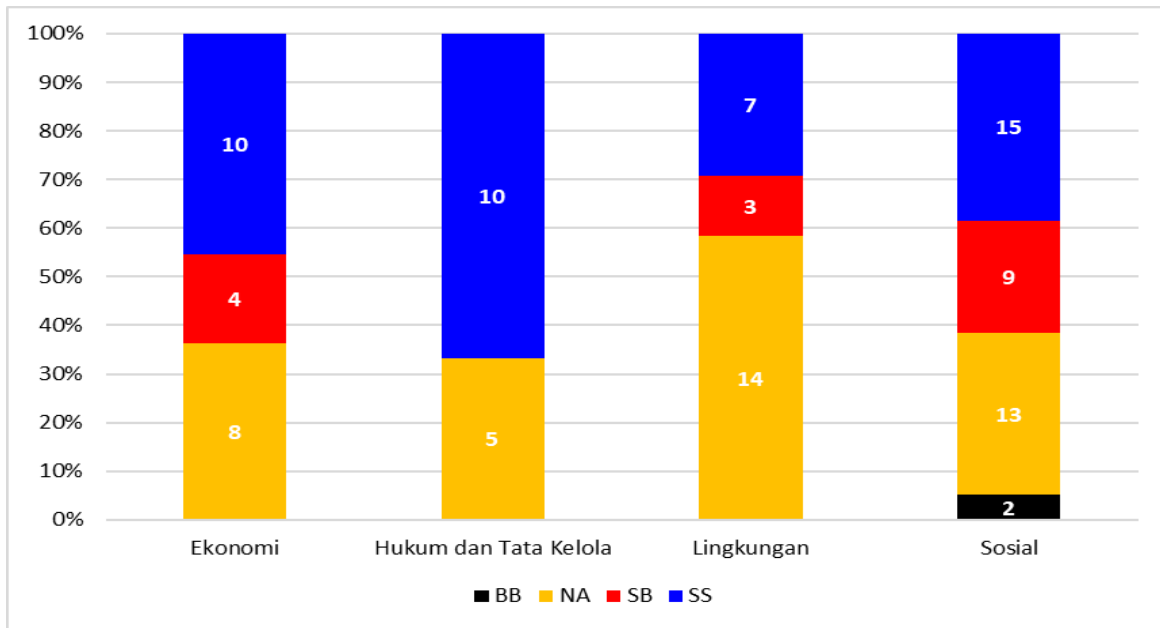
Indikator-indikator ke-15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Samarinda jika diurutkan berdasarkan jumlah indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai, maka indikator-indikator kemiskinan, kesehatan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, pendidikan, air bersih, infrastruktur dan tata kelola berada pada ranking teratas. Indikator-indikator tersebut tentunya menjadi fokus utama dalam upaya evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya tercapaian target dari TPB/SDGs. Adapun Enam capaian yang sudah berhasil dan menyamai target capaian kinerja nasional dominan berasal dari Dinas Kesehatan dan terkait dengan TPB/SDGs Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Berikut adalah grafik hasil pencapaian indikator TPB/SDGs di Kota Samarinda berdasarkan tujuan.



**Gambar 2.** Pencapaian indikator TPB/SDGs di Kota Samarinda berdasarkan tujuan (angka dalam grafik adalah jumlah indikator; sudah tercapai (SS), sudah dilaksanakan tapi belum tercapai (SB), tidak dilaksanakan (BB) dan tidak ada data (NA))

Empat pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi 100 indikator yang menjadi kewenangan Kota Samarinda mampu menampilkan permasalahan dan tantangan dalam upaya pembangunan daerah, dimana pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar atau dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang kemudian didukung oleh

pilar tata kelola. Keempat pilar tersebut relevan dengan tujuan pembangunan ekonomi secara nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah (Alisjahbana dkk., 2018). Data dan analisis yang disajikan pada gambar berikut ini merupakan kumulatif data indikator per pilar dan persentase capaian dari seluruh TPB/SDGs di Kota Samarinda.



**Gambar 3.** Capaian Indikator TPB/SDGs per Pilar (angka dalam grafik adalah jumlah indikator; sudah tercapai (SS), sudah dilaksanakan tapi belum tercapai (SB), tidak dilaksanakan (BB) dan tidak ada data (NA))

Gambar di atas menunjukkan bahwa Pilar Sosial merupakan pilar dengan capaian sudah dilaksanakan tapi belum tercapai dengan nilai tertinggi di Kota Samarinda yaitu 9 indikator, diikuti Pilar Ekonomi sebanyak 4 indikator. Sementara untuk capaian tidak ada data pada Pilar Lingkungan merupakan yang tertinggi di antara pilar lainnya. Ketiadaan data menyebabkan sulitnya dalam upaya analisis dan evaluasi kinerja

pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Samarinda. Sebenarnya capaian TPB ini dapat dirunut berdasarkan OPD. Namun karena ada perubahan pada nomenklatur OPD di Kota Samarinda, data tersebut tidak ditampilkan pada kajian ini. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan beberapa permasalahan dan tantangan pencapaian TPB di Kota Samarinda per pilar dan tujuan.

**Tabel 17.** Permasalahan dan Tantangan Pencapaian TPB/SDGs di Kota Samarinda

Pilar Sosial	Pilar ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola
1) Belum maksimalnya pengumpulan data terkait TPB pada Tujuan 1 hingga Tujuan 5 yang masuk dalam pilar sosial, termasuk <i>updating</i> data penduduk miskin dan pusat-pusat kelompok masyarakat miskin.	1) Belum ada target apapun terkait penyediaan energy baru terbarukan untuk anergi listrik mengingat sudah tingginya angka eletrifikasi di Samarinda dan di Kalimantan Timur	1) Belum optimalnya pelayanan penyediaan sarana prasarana air bersih, termasuk masalah sanitasi dan drainase perairan.	1) Masih belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota oleh OPD dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum lainnya
2) Belum optimalnya kerjasama, kooodinasi dan pengelolaan penanganan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	2) Peningkatan penyediaan listrik pada kawasan-kawasan luar perkotaan yang belum teraliri listrik	2) Belum optimalnya pendataan dan pengelolaan limbah cair dari berbagai aktivitas pembangunan dan industri serta pelayanan umum lainnya	2) Belum Optimalnya hubungan dan kerjasama yang baik dengan dinas dan instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah.
3) Belum optimalnya sosialisasi dan pendataan terkait penduduk prioritas yang menerima program perlindungan sosial.	3) Belum dan tidak ada rencana terkait pengaliran gas ke rumah-rumah	3) Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada sungai utama di Kota Samarinda dan daerah tangkapan air lainnya	3) Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan baik di lingkup sektoral maupun

Pilar Sosial	Pilar ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola
		seperti daerah rawa dan tangkapan air lainnya	lintas tingkat pemerintahan
4) Belum optimalnya program pengembangan dan pendataan terkait pencapaian ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi dan menggalakan sektor pertanian berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah hasil-hasil pertanian.	4) Variasi lapangan pekerjaan yang terbatas dan sangat tergantungnya sektor ketenagakerjaan terhadap sumber-sumber pekerjaan yang memanfaatkan sumberdaya alam terutama sektor pertambangan batu bara	4) Tantangan penyusunan tata ruang (review) terkait telah terlampauinya daya dukung air dan pengaturan daerah pemukiman yang layak serta komitmen konsistensi tata ruang	4) Masih terbatas ketersediaan data termasuk terbatasnya SDM pengelola data yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan pembangunan
5) Belum optimalnya program peningkatan kualitas pendidikan dasar yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota, termasuk masih kurangnya jumlah guru dan isu lain terkait pendidikan dasar.	5) Belum optimalnya pengembangan sektor-sektor inteprenership dan penggunaan teknologi tepat guna, akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan, termasuk pendataan, promosi dan lainnya untuk pengembangan UMKM	5) Optimalisasi pemukiman dan perumahan layak huni dan harga terjangkau	5) Masih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah
6) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat lokal Kalimantan	6) Belum maksimalnya koordinasi antar institusi dalam rangka mendorong investasi	6) Belum optimalnya penanganan, penangan, adaptasi dan mitigasi kebencanaan terutama bencana banjir dan kebakaran pemukiman.	
7) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan wisatawan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional	7) Belum maksimalnya pendataan tenaga kerja terampil dan berpendidikan, termasuk informasi kualitas tenaga kerja yang tersedia mencakup pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja yang umumnya belum memenuhi kebutuhan pasar serta kepentingan pembangunan daerah.	7) Minimnya ruang terbuka hijau dan kawasan berhutan di Kota Samarinda	
8) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa	8) Informasi perlindungan pekerja dan hak-hak pekerja lainnya yang belum maksimal	8) Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah B3	
9) Belum terakomodirnya pengetahuan tentang Budaya lokal Kalimantan dalam muatan lokal kurikulum sekolah	9) Tantangan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana-prasarana transportasi jalan, pelabuhan dan bandara, termasuk belum optimalnya pengembangan angkutan umum yang ramah lingkungan dan rendah emisi.	9) Belum optimalnya pengelolaan, promosi dan pembinaan terkait peningkatan sektor wisata	

Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Lingkungan	Pilar Hukum dan Tata Kelola
10) Pengarusutamaan gender dalam pelaksanaannya masih terbatas	10) Sedang disusunnya RAD GRK terkait <i>driver</i> emisi dan mitigasi dan adaptasinya, termasuk pendataan sumber-sumber emisi	10) Belum optimalnya pendataan terkait Gas Rumah Kaca dan emisi	
11) Peningkatan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-haknya dengan memuatnya secara khusus pada visi dan misi rencana pembangunan	11) Belum optimalnya kerjasama penelitian dan pemanfaatan hasil-hasil kajian dan penelitian terkait pembangunan berkelanjutan.	11) Tidak terkelolanya kawasan atau area pasca tambang batu bara bahkan telah mengakibatkan korban meninggal dunia pada lobang-lobang tambang yang menjadi danau	
12) Belum optimalnya pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga	12) Belum optimalnya mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah sehingga meningkatnya pendapatan asli daerah Kota Samarinda.	12) Tantangan pelaksanaan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati	
13) Pembangunan sarana prasarana yang belum melihat dan mengakomodir penyandang disabilitas.	13) Belum maksimalnya perwujudan <i>smart city</i> di Kota Samarinda.	13) Belum terdatanya sumber-sumber keanekaragaman hayati yang nilai tambahnya sudah meningkat terkait tanaman yang digunakan untuk obat-obat baik tradisional maupun mekanis/modern dalam bentuk industri UMKM.	
14) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri	14) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait manajemen data Pilar Ekonomi TPB.	14) Tantangan terhadap pengaturan dan pengawasan terhadap perdagangan satwa liar di dalam kota	
15) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait manajemen data Pilar Sosial TPB.		15) Belum tereksposnya kawasan-kawasan ekosistem penting yang dapat digunakan untuk kawasan perlindungan setempat dan/atau kawasan wisata alam	
16) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait manajemen data Pilar Sosial TPB.		16) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait manajemen data Pilar Lingkungan TPB.	

Berdasarkan uraian-uraian di atas beberapa hal yang menjadi catatan, seperti 1) bahwa hasil kajian TPB/SDGs tersebut merupakan kajian dengan keterbatasan data sehingga hasilnya masih dapat diperbaharui jika ada klarifikasi dan

ketersediaan data lebih lanjut; 2) bahwa data TPB/SDGs tidak terinput dengan baik pada instansi tertentu sehingga ada kesulitan dalam analisis capaiannya; 3) kapasitas sumber daya manusia (SDM) birokrasi dan OPD baik tingkat

pendidikan maupun kepedulian terhadap capaian TPB/SDGs; 4) bahwa diperlukan tindak lanjut untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB untuk melihat progress capaiannya dan menyiapkan untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda di Tahun 2024, RPJMD 2025-2030, dan berbagai dokumen turunannya.

Tantangan pemerintah Kota dalam pencapaian TPB/SDGs sebenarnya sangat kompleks, mengingat bahwa kota seringkali memiliki masalah sosial yang pelik. Beberapa masalah perkotaan yang sangat erat dengan TPB/SDGs antara lain terkait urbanisasi, kantong kemiskinan, pemukiman kumuh, pemenuhan air bersih, energi, dan lain-lain (Kumar & Sharifi, 2022). Faktor-faktor lain juga sering mempengaruhi capaian TPB/SDGs, seperti kondisi pandemi Covid19. Hal ini sangat umum terjadi di berbagai negara sehingga mempengaruhi agenda TPB/SDGs (Mohieldin et al., 2022; Long et al., 2022), termasuk kondisi yang mempengaruhi ekonomi Indonesia dan dalam hal ini juga Kota Samarinda. Capaian TPB/SDGs sangat erat hubungannya dengan konteks perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait dengan berbagai sumber emisi juga menjadi penting, seperti sektor energi terbarukan, pertanian, sampah dan transportasi. Tren kenaikan nilai pendapatan masyarakat merupakan tantangan tersendiri, terutama yang hidup pada kawasan perkotaan, mengingat akses terhadap sumber daya relatif lebih mudah dibandingkan pada kawasan pedesaan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan terus meningkat, sehingga kepedulian terhadap berbagai hal juga akan meningkat. Demikian pula dengan keterlibatan para pihak, terkait capaian TPB/SDGs pada tingkat manajemen menjadi perhatian serius, baik untuk keperluan mengumpulkan data maupun keterlibatan dalam melaksanakan program terkait capaian TPB/SDGs.

Kajian ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh para akademisi di kampus dalam hal ini LP2M Universitas Mulawarman yang membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengidentifikasi capaian indikator TPB/SDGs yang dijadikan bahan menentukan program kegiatan prioritas yang termuat dalam dokumen rencana pembangunan. Sehingga definisi pengabdian masyarakat dampaknya sangat luas dan penting, yaitu para pihak langsung seperti Organisasi Perangkat Daerah yang

langsung menggunakan data ini untuk menentukan program kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) OPD terkait. Pihak lain yang menerima dampak adalah penduduk Kota Samarinda yang mendapatkan manfaat dari program kegiatan OPD dari segala sisi kehidupan yang termuat dalam TPB. Keterlibatan para pihak dalam proses penyusunan kajian dan inventarisasi capaian TPB ini juga maksimal karena berbagai data dalam dokumen ini harus diklarifikasi.

## KESIMPULAN

Kajian ini menampilkan capaian pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan untuk menjawab indikator TPB/SDGs. Masih terdapat kelemahan berbagai program yang terkait dengan indikator TPB/SDGs di Kota Samarinda yang datanya tidak ada (40 %), belum tercapai walau sudah dilaksanakan (16 %), bahkan yang sama sekali belum dilaksanakan (2 %). Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Samarinda sehingga menjadi catatan prioritas pada rencana pembangunan dan menjadi alat evaluasi kinerja per perangkat daerah yang bertanggungjawab pada indikator tertentu TPB/SDGs. Diperlukan kepedulian yang lebih lagi dari Perangkat Daerah terkait untuk segera menyelesaikan terkait ketersediaan data, mengintegrasikan ke dalam rencana strategi dan rencana kerja, serta menentukan prioritas program kegiatan terkait untuk menjawab indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda dan Seluruh Instansi Perangkat Daerah Kota Samarinda yang terlibat dalam proses pengumpulan data capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Samarinda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Salsiah, A. & Murniningtyas, E. (2018). Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi (2nd edition). Bandung: Unpad Press.
- Bappenas<sup>1</sup> (2020). Metadata II Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals

- (SDGs) Indonesia Pilar Sosial. Tersedia pada <https://sdgs.bappenas.go.id/metadatas-pilar-sosial-edisi-ii/>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022
- Bappenas<sup>2</sup> (2020). Metadata II Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Ekonomi. Tersedia pada <https://sdgs.bappenas.go.id/metadatas-pilar-ekonomi-edisi-ii/>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022
- Bappenas<sup>3</sup> (2020). Metadata II Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Lingkungan. Tersedia pada [https://sdgs.bappenas.go.id/metadatas-pilar-lingkungan-edisi-ii\\_rev3/](https://sdgs.bappenas.go.id/metadatas-pilar-lingkungan-edisi-ii_rev3/). Diakses pada tanggal 2 Maret 2022
- Bappenas<sup>4</sup> (2020). Metadata II Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Hukum dan Tata Kelola. Tersedia pada <https://sdgs.bappenas.go.id/metadatas-pilar-hukum-edisi-ii/>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2022
- Bappenas (2019). Roadmap of SDGs Indonesia: A Highlight. Ministry of National Development Planning/Nasional Development Planning Agency.
- Hjorth, P., and Bagheri, A. (2006) Navigating towards sustainable development: a systems dynamics approach. *Futures* 38:74–92. <http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2005.04.005>
- Ishartono dan Raharjo, ST. (2016) Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal* Volume: 6 Nomor: 2 Halaman: 154 – 272.
- Kumar, S., Sharifi, A. (2022) SDGs in Global South Cities for Building Resilience to Climate Chang. *SDGs in Asia and Pacific Region*. DOI: 10.1007/978-3-030-91262-8\_11-1
- Nilsson, M., and Costanza, R. (2015) Overall framework for the sustainable development goals. Pages 7–12 in ICSU, ISSC. *Review of the sustainable development goals: the science perspective*. ICSU, Paris, France.
- Long, G., Clough, E., Rietig, K. (2022). Global Partnerships for the SDGs. *Partnerships and the Sustainable Development Goals*. DOI: 10.1007/978-3-031-07461-5\_3
- Lim, MM., Jørgensen, PS., Wyborn, CA. (2018) Reframing the sustainable development goals to achieve sustainable development in the Anthropocene—A systems approach. *Ecol. Soc.* 23, 1–19.
- Liu, J., Mooney, H., Hull, V., Davis, S. J., Gaskell, J., Hertel, T., Lubchenco, J., Seto, K. C., P. Gleick, P. C. Kremen, P., Li, S. (2015) Systems integration for global sustainability. *Science* 347(6225): 1258832. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1258832>
- Mohieldien, M., Wahba, S., Gonzales-Perez AM., Shehata M. (2022) SDGs and the 2030 Agenda: On Crisis and Opportunity. *Business, Government and the SDGs*. DOI: 10.1007/978-3-031-11196-9\_1
- SMERU Research Institute. (2017) Dari MDGs Ke SDGs: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret, *Buletin SMERU* No. 2/2017.